

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Perang Dunia II, Uni Soviet menjadi salah satu negara terkuat di dunia dengan potensi politik dan ekonominya. Uni Soviet adalah negara terbesar di muka bumi. Wilayahnya mencakup hampir seperenam permukaan daratan bumi. Lebih tepatnya seluas 22.400.000 km persegi. Area sebesar itu dihuni penduduk sebanyak 290 juta jiwa dengan beragam etnis, mulai dari Rusia (50,78 persen), Ukraina (15,45 persen), Uzbek (5,84 persen), Belarusia (3,51 persen), Kazakh (2,38 persen), hingga Armenia (1,62 persen). Uni Soviet berhasil mengalahkan pasukan Nazi Jerman pada Pertempuran Berlin 1945, punya puluhan ribu senjata nuklir, mendirikan Pakta Warsawa pada 1955 sebagai aliansi militer negara-negara Blok Timur, dan sukses mengembangkan program luar angkasa sejak 1950-an. Sejumlah prestasi mentereng itu sudah layak untuk menggelari Soviet dengan sebutan adikuasa (Firman, 2018).

Tapi segala kejayaan itu runtuh sejak 1 Januari 1991. Uni Soviet mengalami keretakan hebat. Para pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia (tiga negara pelopor berdirinya Uni Soviet) menandatangani perjanjian yang mengatur persemakmuran negara-negara merdeka pada 8 Desember 1991 (The Presidential Library, 1991)—itulah pertanda awal bubarnya Uni Soviet. Bahkan pada 22 Desember 1991 stasiun televisi Rusia membuka program siaran dengan pengumuman: "Selamat malam. Inilah beritanya. Negara Uni Soviet kini sudah tidak ada lagi." Mikhail Gorbachev memilih mengundurkan diri dari kursi pemimpin tertinggi Uni Soviet di tanggal 25 Desember 1991. Keesokan harinya, pada 26 Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar dengan ditandai

pengambilalihan kantor-kantor Uni Soviet oleh pemerintahan Rusia (BBC News, 2016).

Bubaranya Uni Soviet membuat sebagian besar negara yang dulu berada dibawah naungan Uni Soviet memperoleh kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Hal tersebut didorong oleh banyaknya konflik teritorial di negara Bekas Republik Soviet yang muncul sebelum keruntuhan Uni Soviet dan beberapa di antaranya diciptakan secara sengaja oleh otoritas Uni Soviet. Uni Soviet menjaga wilayah tertentu tetap terkendali, beberapa ketegangan atau konflik wilayah yang masih membeku dan status-quo telah diteruskan ke Rusia yang dianggap sebagai penerus Uni Soviet. Akibatnya ditahun yang sama, Rusia mulai memimpin kebijakan eksternal tertentu, khususnya terhadap negara-negara yang menjadi bagian dari Uni Soviet untuk mereformasi Uni Soviet dan mengendalikan semua wilayah yang dulunya bagian dari Uni Soviet. Sehingga meskipun Uni Soviet runtuh, Rusia tetap dekat dengan negara-negara bekas wilayah Uni Soviet.

Rusia memiliki tujuan tersembunyi di Ukraina membuat Vladimir Putin berusaha untuk mendapatkan kembali kendali dan membuat Ukraina bergantung pada Rusia. Di sisi lain, Vladimir Putin melakukan kebijakan luar negeri yang berbeda di setiap ketegangan atau konflik untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis keterlibatan Rusia di Ukraina. Selain itu, apa yang telah dilakukan Vladimir Putin di Ukraina untuk menghilangkan atau mengubah Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Ukraina demi mematuhi otoritas Rusia dan melakukan kebijakan luar negeri yang sesuai akan dianalisis.

Rusia dan Ukraina berbagi banyak hal dalam sejarah mereka. Ibu kota Ukraina yang bernama Kiev memiliki nama lain sebagai "Ibu Pertiwi Rusia atau Tempat lahirnya Peradaban Rusia". Oleh karena itu, akan lebih tepat jika dibuat sketsa tentang latar belakang historis hubungan Rusia-Ukraina di setiap bidang untuk menganalisis hubungan Rusia-

Ukraina saat ini dan memahami asal-usul ketegangan antara dua negara tersebut setelah Ukraina memperoleh kemerdekaan penuh dari Uni Soviet.

Mengenai kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina, secara historis, hubungan Rusia dan Ukraina memiliki hubungan diplomatik yang baik. Setelah Ukraina menjadi bagian dari Rusia selama kurang lebih 6 abad, hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina secara resmi dimulai pada 1990-an segera setelah pembubaran Uni Soviet, di mana Rusia dan Ukraina telah mendirikan republik konstituen. Hubungan bilateral juga membawa manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi Ukraina dan Rusia (Sutela, 2012). Selain itu perjanjian antara Rusia dan Ukraina tahun 1997 mengenai Armada Laut Hitam menciptakan hubungan militer yang simbiosis bagi keduanya (Encyclopaedia Britannica, 2018).

Menjelang awal tahun 1990-an negara-negara satelit Soviet di Eropa Timur menggulingkan pemerintah komunis masing-masing membuat pengaruh Rusia di Eurasia mulai anjlok. Maka dari itu, dorongan kebijakan luar negeri Rusia adalah untuk menahan dan merebut kembali basis kekuatannya di wilayah tersebut. Rusia sebagai pendiri, akan membentuk sebuah organisasi sebagai alat politik luar negeri yang berfokus pada peningkatan pengaruh geopolitik negara, dan pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas. Untuk mencapai tujuan itu, Rusia meminta anggota bekas Uni Soviet untuk bersatu kembali di bawah kesatuan militer, ekonomi dan politik yang menyerupai Uni Eropa di Eropa Barat, yaitu *Commonwealth of Independent States* (CIS) sebuah organisasi antar pemerintah regional oleh Rusia, Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Turkmenistan, Armenia, Moldova, Georgia, Estonia, Latvia, dan Lithuania yang didirikan pada Desember 1991 (Encyclopaedia Britannica, 2018).

Setelah pecahnya Uni Soviet, Ukraina menjadi fokus para pemain strategis seperti AS, Cina, dan Eropa, semuanya berlomba-lomba untuk mempertahankan kekuasaan dan

pengaruhnya di Eurasia. Seperti yang diharapkan, Ukraina terpecah antara ingin bersekutu dengan Rusia atau bersekutu dengan negara lain terutama Uni Eropa (UE). Ukraina telah melakukan kebijakan pro-Rusia selama bertahun-tahun sampai menimbulkan Revolusi Oren dan gerakan Euromaidan, merupakan gelombang demonstrasi dan kerusuhan oleh orang-orang Ukraina yang pro-Barat, diawali setelah Victor Yanukovich menolak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa dalam perjanjian perdagangan, tetapi juga perjanjian politik yang mengikat Ukraina untuk mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Eropa.

Ukraina mendapatkan undangan untuk masuk menjadi anggota UE pada tahun 2013 (BBC News, 2014). Upaya kebijakan Rusia dalam menghadang hubungan Ukraina-EU, yaitu Presiden Putin setuju untuk meminjamkan Ukraina dana sebesar 15 miliar dolar dan memberikan potongan harga gas alam sebanyak 33% (BBC News, 2013). Hubungan bilateral Rusia-Ukraina mulai memburuk setelah peristiwa Revolusi Oranye/ Euro Maidan di Ukraina dan penggantian presiden pro-Rusia Viktor Yanukovich dengan presiden pro-Barat Petro Proshenko (Interfax-Ukraine News Agency, 2014). Akhirnya, Rusia melakukan kebijakan ofensif melakukan intervensi berupa invasi militer di bagian timur Ukraina (BBC News, 2014).

Mayoritas warga Ukraina yang tinggal di bagian timur Ukraina secara etnis adalah orang Rusia dan mereka berniat untuk menjaga hubungan dekat dengan Rusia daripada dengan negara-negara Barat. Ukraina lebih dekat ke Rusia secara historis, geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya daripada pemain strategis lainnya. Karena kedekatan ini, Rusia melihat dirinya lebih pantas mendapatkan dukungan Ukraina daripada pemain strategis lainnya, terutama EU.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka pernyataan penelitian yang hendak dijawab adalah mengapa Rusia

melibatkan diri dalam konflik separatisme di bagian timur Ukraina?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Neorealisme

Neorealisme atau realisme struktural adalah teori hubungan internasional yang awalnya dipaparkan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics* (Teori Politik Internasional). Neorealisme berusaha menjelaskan Hubungan Internasional berdasarkan tekanan struktural yang disebabkan oleh anarki. Akan tetapi, kaum realis struktural memiliki penilaian berbeda tentang seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan oleh negara dalam kondisi tersebut. Untuk alasan ini, neorealisme dibagi menjadi dua cabang: realisme defensif dan ofensif. Realisme defensif berpendapat bahwa negara harus memperoleh jumlah kekuatan tepat yang diperlukan agar mereka dapat berkembang. Namun negara seharusnya tidak memaksimalkan kekuatan relatif mereka dalam upaya untuk menjadi hegemoni. Perilaku tersebut dianggap kontraproduktif karena akan memicu terjadinya koalisi yang tidak seimbang diantara negara-negara yang dapat merusak posisi mereka di panggung dunia. Sebaliknya, realisme ofensif menyatakan bahwa negara harus memaksimalkan kekuatan relatif mereka untuk menjadi negara hegemoni, jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dalam pandangan ini, mengejar kekuasaan besar adalah perlindungan terbaik untuk kelangsungan hidup negara.

Realisme defensif Waltz menawarkan teori politik internasional yang sistemik dan berpusat pada negara. Komponen struktural realisme defensif Waltz terdiri dari struktur anarki yang didefinisikan sebagai tidak adanya pemerintah dan distribusi kemampuan dalam menjaga keamanan di seluruh sistem. Selain itu, Waltz hanya membuat dua asumsi eksplisit mengenai negara: aktor merupakan

negara kesatuan yang setidaknya, memaksimalkan kebijakan demi memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri.

Karena Waltz mengasumsikan bahwa negara adalah aktor kesatuan yang membedakan hanyalah dalam kemampuan militer dan bagaimana negara bertahan diri dalam sistem anarki, keseimbangan kekuasaan menjadi '*iron law*' karena negara hanya dapat menjaga kelangsungan hidup mereka dengan memastikan bahwa tidak ada satu pun dari negara saingan tumbuh terlalu kuat. Keseimbangan kekuatan adalah bagian dinamis dari model teoretis Waltz yang sebaliknya statis ketika ia berpendapat bahwa jumlah kekuatan besar dilengkapi dengan kemampuan militer yang baik, akan membentuk keseimbangan dan karakter sistem internasional.

Perbedaan antara sistem bipolar di mana keseimbangan dipertahankan oleh dua kekuatan besar dan sistem multipolar di mana sistem anarkis dihuni oleh tiga atau lebih kekuatan besar. Dalam pandangan Waltz, dunia bipolar lebih stabil daripada dunia multipolar karena 'ketidakpastian tentang siapa yang mengancam siapa, tentang siapa yang akan menentang siapa, dan tentang siapa yang akan mendapat atau kehilangan dari tindakan negara lain yang semakin cepat seiring dengan meningkatnya jumlah negara. Waltz melanjutkan di dunia unipolar tidak ada lagi pengecekan dan keseimbangan pada negara hegemoni. Perilakunya lebih ditentukan oleh kebijakan internalnya sendiri daripada tekanan struktural eksternal

Hal tersebut dapat menjelaskan dinamika internal Rusia dan kebijakan ofensif eksternal di Negara-negara Paska-Soviet berkaca kepada neoralisme defensif. Kemudian, keinginan untuk memaksimalkan kekuatan relatif untuk membatasi ruang gerak dan saling menggunakan pengaruh satu sama lain untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Penyeimbangan internal terjadi ketika negara-negara menumbuhkan kemampuan mereka sendiri dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengeluaran militer. Di sisi lain, penyeimbangan eksternal

terjadi ketika negara-negara masuk ke dalam aliansi untuk mengamati kekuatan negara atau aliansi lain yang lebih kuat (Humphreys, 2012). Asumsi Neorealis diaplikasikan dengan perjuangan Vladimir Putin menyelesaikan konflik internal, mendirikan FSB (*Federal Security Service*) atau agen keamanan federal dan seterusnya untuk membangun kembali sektor ekonomi dan militer Rusia. Selanjutnya, upaya Rusia menciptakan kebijakan-kebijakan politik untuk menjaga Uni Eropa agar tidak menjadi negara unipolar dikawasan Eurasia merupakan contoh keseimbangan kekuatan eksternal dalam Neorealisme.

Realisme ofensif Mearsheimer juga merupakan teori struktural politik internasional yang memberi perhatian khusus pada kekuatan dan pengaruh untuk mencapai keamanan melalui dominasi dan hegemoni dalam politik internasional, tetapi mengklaim memiliki relevansi dengan negara lain pada tingkat yang berbeda-beda. Sama seperti realisme defensif Waltz, realisme ofensif Mearsheimer juga mengasumsikan bahwa sistem internasional bersifat anarkis di mana kelangsungan hidup adalah tujuan utama negara. Namun Mearsheimer menambahkan tiga asumsi tambahan pada teorinya yang tidak termasuk di antara asumsi eksplisit Waltz. Menurut bukunya yang berjudul *The Tragedy of Great Power Politics* (Tragedi Politik Kekuatan Besar). Tiga asumsi tambahan eksplisit Mearsheimer adalah sebagai berikut:

1. Semua negara memiliki kemampuan militer ofensif, yang memungkinkan mereka untuk saling menyakiti dan berpotensi menghancurkan satu sama lain
2. Negara tidak pernah dapat memastikan niat negara lain. Akibatnya, tidak ada yang dapat sepenuhnya meyakini bahwa para pesaingnya tidak akan menggunakan kekuatan militer terhadap mereka pada waktu tertentu
3. Negara adalah aktor rasional yang mampu memunculkan strategi yang baik untuk memaksimalkan kemungkinan mereka untuk bertahan hidup

Mearsheimer berpendapat bahwa kombinasi dari kelima asumsinya mendorong negara untuk memaksimalkan kekuatan relatif. Dengan demikian, semua kekuatan besar bercita-cita untuk mencapai puncak kekuasaan, yaitu hegemoni. Berbeda sekali dengan realisme defensif Waltz, yang hanya mempertimbangkan hegemoni global, namun realisme ofensif Mearsheimer membuat perbedaan antara hegemoni global dan hegemoni regional. Yang pertama mendominasi seluruh dunia sementara yang terakhir memerintah atas benua. Realisme ofensif menyatakan bahwa suatu negara harus menikmati keunggulan militer dan menjadi satu-satunya kekuatan besar dalam sistem internasional yang memenuhi syarat sebagai hegemoni

Neorealisme ofensif Mearsheimer menggambarkan bahwa suatu negara perlu memastikan keamanannya dan memiliki strategi untuk memenuhi tingkat keamanan yang memuaskan. Pada akhirnya, neorealisme ofensif Mearsheimer terkesan lebih pesimistis dari politik internasional yang ditandai oleh kompetisi keamanan antar negara yang berbahaya yang mungkin mengarah pada konflik dan perang (Mearsheimer, *The False Promise of International Institutions*, 1994). Dalam neorealisme ofensif, sistem internasional memberikan kekuatan besar dengan dorongan yang kuat untuk mengambil tindakan ofensif guna meningkatkan keamanan dan menjamin kelangsungan hidup mereka. John Mearsheimer berpendapat bahwa negara dengan kekuatan besar mengakui bahwa cara terbaik untuk memastikan keamanan mereka adalah dengan mencapai hegemoni. Jadi, dalam konteks ini, negara hanya perlu menghilangkan tantangan dari kekuatan besar negara lainnya. Hanya negara yang salah arah yang akan melewatkan kesempatan untuk memiliki hegemoni dalam sistem internasional karena mereka berpikir sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, tidak sulit untuk memahami Kebijakan Luar Negeri Rusia di Ukraina yang menggunakan pengaruh ekonomi dan politik untuk mempertahankan status hegemoni di Eropa Timur dan

Wilayah Kaukasus. Hal ini telah menyebabkan konflik antara Rusia dan negara-negara di wilayah tersebut.

Maka dari itu, seorang neorealis ofensif seperti Mearsheimer percaya bahwa strategi terbaik suatu negara untuk meningkatkan kekuatan relatifnya hingga mencapai hegemoni adalah dengan mengandalkan taktik ofensif. Karena itu, negara dengan kekuatan besar kemungkinan akan mengejar kebijakan ekspansionis yang membawa mereka lebih dekat kepada kekuatan hegemoni. Jelas, tidak mudah untuk mencapai status hegemoni dunia karena berbagai masalah yang ada seperti kendala-kendala dalam proyeksi kekuatan lintas lautan dan aksi serangan balik. Karena itu, negara-negara dengan kekuatan besar berusaha untuk mendominasi dan tetap mengendalikan wilayah geografisnya. Selanjutnya, niat untuk menjadi hegemoni tersebut selalu mengarah pada konflik dan perang. Karena itu, dari sudut pandang Neorealisme, kemungkinan perang tak terhindarkan. Hal ini ditunjukkan Mersheimer dalam asumsinya bahwa kebijakan ekspansionis Barat dan Eropa membuat Rusia bersikap defensif terhadap aktor tersebut dan melakukan kebijakan ofensif Rusia terhadap Negara Paska-Soviet. Sebaliknya, neorealisme defensif berpendapat bahwa strukturanarki dari sistem internasional mendorong negara memberikan insentif untuk ekspansi hanya dalam kondisi yang jelas.

Sebagai tambahan, realis defensif tidak menyangkal akan adanya peluang ekspansi negara dan negara seharusnya tidak mengeksploitasi peluang tersebut. Dalam *Causes of War* (Sebab-sebab Perang), Stephen Van Evera berpendapat bahwa negara-negara yang bertujuan mempertahankan status quo harus menjadi agresor untuk mencegah agresi di kemudian hari terhadap diri mereka sendiri atau sekutu mereka (Evera, 1998). Kasus ini dianggap relevan untuk negara-negara yang memiliki hambatan geografis yang kurang protektif. Seperti yang dilakukan perilaku Rusia pada Bekas Republik Soviet dengan anggapan sebagai defensif neorealisme. Sebagai contoh, dalam intervensi Rusia terhadap Ukraina untuk

mengubah orientasi pro-barat Ukraina dan sebagai keseimbangan kekuasaan terhadap Ukraina, Rusia menggunakan pengaruhnya dengan mengendalikan harga bahan bakar. Vladimir Putin menjadi agresif kepada Ukraina untuk mendapatkan kendali atas Eropa Timur setelah kehilangan Polandia yang terletak di wilayah strategis dianggap vital untuk ekspansi militer eksternal guna melawan kekuatan luar yang mengancam Rusia.

Konsep Intervensi

Untuk membahas permasalahan tersebut, maka kita harus menguraikan terlebih dahulu konsep intervensi. Apakah yang dimaksud dengan intervensi dan mengapa negara-negara melakukan intervensi?

Menurut sistem negara berdaulat klasik, yang dibentuk setelah Westphalia, intervensionisme adalah pola perilaku yang harus dilarang dan dibendung dengan pengendalian hukum dan diplomatik. Intervensi yang dilakukan oleh suatu negara dalam urusan negara lain akan menghancurkan ide-ide “*sovereign equality and territoriality*” (Evans & Newnham, 1992). Jadi menurut prinsip kedaulatan, intervensi merupakan hal yang terlarang. Namun dalam kenyataannya banyak negara yang melakukan intervensi. Intervensi sering kali dilakukan oleh negara-negara besar.

Kita sering mendefinisikan intervensi sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk campur tangan dalam masalah intern pihak lain. K.J. Holsti mendefinisikan konsep intervensi sebagai berikut:

“We will use the term intervention to designate any activity that deliberately seeks to change the political leader (s) or the constitutional structure of foreign political jurisdiction. An additional component is that the activity is done without the consent or against the wishes of the legally constituted or recognized authorities.” (Holsti, 1974)

Berdasarkan definisi tersebut, tindakan Rusia di Ukraina memang bisa dikategorikan sebagai intervensi. Misalnya seperti yang telah disebutkan dibagian awal, Yanukovych menolak kerjasama dengan UE terjadi karena adanya campur tangan Rusia. Lebih lanjut Holsti membagi beberapa bentuk intervensi, yaitu: (1) *various types of clandestine political actions*; (2) *terrorism*; (3) *demonstrations of force*; (4) *subversions*; (5) *military intervention*.

Jika kita amati, tindakan Rusia di Ukraina bisa dikategorikan dalam bentuk *clandestine political actions* (aksi-aksi politik klandestine) dan *military intervention* (intervensi militer). Tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan dalam bentuk aksi politik klandestine yaitu menyebarkan propaganda melalui surat kabar, media sosial yang dilakukan oleh GRU (badan intelejen militer Rusia) saat kejatuhan Yanukovych sebagai presiden. Sedangkan contoh intervensi militer yaitu mengirimkan pasukan militer pada untuk membantu perang, seperti yang dilakukan Rusia pada Ukraina pada saat terjadinya krisis separatisme di Ukraina.

Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Rusia melibatkan diri dalam konflik separatisme di Ukraina? Pertanyaan ini merupakan inti dari masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Konsep Kepentingan Nasional

Ada beberapa alasan yang mendorong suatu negara untuk melakukan intervensi pada negara lain, yaitu:

“To achieve objectives, defend interest or promote social values abroad government may-instead of sending diplomatic notes or making military threats- infiltrate foreign voluntary organizations, sponsor strikes and riots, create political scandals, attempt a coup d’etat; or, on their own territory, organize, train, and arm a group of foreign dissidents and then send them home to conduct guerilla warfare or subversion.” (Holsti, 1974)

Jadi salah satu sebab mengapa suatu negara melakukan intervensi adalah untuk mempertahankan kepentingannya. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa bentuk-bentuk faktor yang mendorong suatu negara dalam melakukan intervensi adalah menurut Dmitri Trenin, “*Rusia has thus some vital interest in the Caucasus, starting with geopolitics and covering the economic, military and social spheres*” (Trenin, 1996). Dalam pernyataan lain menyebutkan bahwa kepentingan nasional suatu negara, beberapa kriteria dapat digunakan seperti, 1) kriteria ekonomi: berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan posisi ekonomi negara dianggap sebagai kepentingan nasional. Misalnya, memperbaiki neraca perdagangan, memperkuat basis industry, menjamin akses terhadap minyak, gas dan energi lain; 2) kriteria ideologi: mempengaruhi negara untuk mengadopsi cara-cara tertentu untuk melihat dunia dan melihat kepentingan nasionalnya; 3) akumulasi power: melalui peningkatan kekuatan ekonomi, promosi ideologi, meningkatkan kapabilitas militer; 4) keamanan militer: pada intinya, kepentingan suatu negara ada pada upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (survival) bangsa dan keamanan nasional. Dengan demikian, berbagai pernyataan di atas memberikan penekanan mengenai munculnya berbagai faktor yang mendorong aksi suatu negara terhadap negara lain. Faktor tersebut sangat spesifik sehingga memunculkan kebutuhan kajian untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong aksi suatu negara terhadap negara lain.

Peneliti menduga bahwa salah satu faktor utama yang mendorong intervensi Rusia pada konflik pada tahun 2014 diantaranya adalah faktor ekonomi. Hal ini didasarkan pada Rusia merupakan produsen gas alam dan Ukraina merupakan salah satu konsumen utama. Hal tersebut lah yang menjadi justifikasi Rusia ikut terlibat dalam konflik di Ukraina demi menjaga pasar migas Rusia dengan Uni Eropa. Hubungan Ukraina dan Rusia diwarnai dengan persaingan untuk memperoleh pasar. Rusia khawatir dengan kedekatan Ukraina

dan UE mengakibatkan lepasnya dependensi gas dari Rusia (Widiassa, 2018).

Dalam faktor geopolitik maka dapat diketahui bahwa Rusia memiliki kepentingan untuk membentuk *buffer zones* di Eropa Timur. Konsep Buffer zones sendiri bertujuan untuk menghalau berbagai ancaman yang berasal dari luar. Daerah *buffer zones* sendiri dimulai dari Laut Baltik ke selatan Pegunungan Carpathian, Laut Hitam dan Kaukasus. Dalam hal ini, Ukraina merupakan salah satu negara yang berada dalam kawasan Baltik dan memiliki akses ke Laut Hitam membuatnya menjadi negara yang penting bagi keamanan nasional Rusia. Rencana Ukraina untuk bergabung sebagai anggota UE memaksa Rusia untuk menggunakan kekuasaannya agar tidak menimbulkan ancaman keamanan nasional dimasa depan. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa bagi Rusia, Ukraina merupakan negara perluasan UE hingga ke Eropa Timur (termasuk di dalamnya adalah perluasan hingga Ukraina) adalah suatu bentuk penghinaan terhadap kekuatan Rusia. Untuk menjaga pengaruhnya di Eropa Timur tetap eksis maka Rusia harus melakukan intervensi dalam konflik Ukraina (Wisnu, 2014).

Dalam penelitian ini juga akan mengedepankan faktor utama yang mendorong intervensi Rusia pada konflik pada tahun 2014 diantaranya adalah faktor militer. Hal mendasar munculnya faktor militer dikarenakan kepentingan suatu negara ada pada upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (*survival*) bangsa dan keamanan nasional. Kepentingan keamanan patut mendapatkan perhatian karena pendorong utama Rusia melakukan intervensi terhadap Ukraina adalah militer. Keinginan Rusia menggunakan Ukraina sebagai pengukuh kekuasaan sangat kuat. Rusia berada dalam urutan kedua dari deretan negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Pada tahun 2013 rangkingnya berada pada urutan setelah Amerika Serikat. Selain itu, Rusia juga merupakan negara adidaya nuklir (Paramita, 2014). Sama seperti kepentingan di

Transkaukasus menurut tulisan Dmitri Trenin menyatakan bahwa:

“It would be true to say that it was the military who played the most prominent role in Transcaucasia. Their forces were stationed throughout the area and they had access to all the important politicians. They also controlled the most vital assets in any conflict situation, namely weapons, ammunition and infrastructure.”
(Trenin, 1996)

D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori diatas maka penulis menyimpulkan alasan keterlibatan Rusia dalam konflik separatisme di daerah bagian timur Ukraina tahun 2014-2015 didorong oleh kepentingan nasional berupa:

1. Faktor ekonomi, yaitu jalur transit energi di Ukraina yang menghubungkan jalur energi dari Rusia ke Eropa membuat perekonomian Rusia terancam saat Ukraina bekerjasama dengan Uni Eropa akan menghilangkan ketergantungan ekonomi.
2. Faktor geopolitik, yaitu letak negara Rusia yang dikelilingi oleh negara-negara pecahan Uni Soviet, ingin membentuk buffer zones di Eropa Timur. Hal ini mengingat Ukraina merupakan salah satu negara yang berada dalam kawasan Baltik dan memiliki akses ke Laut Hitam membuatnya menjadi negara yang penting bagi keamanan nasional Rusia.
3. Faktor militer, yaitu keinginan Rusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (survival) bangsa dan keamanan nasional

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menjelaskan keterlibatan Rusia terhadap konflik separatisme di bagian timur Ukraina.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan berupa studi literatur yang berhubungan dengan teori dan konsep serta berita mengenai peristiwa yang relevan dengan topik penelitian, sehingga mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel surat kabar, baik cetak maupun elektronik. Perolehan data dikumpulkan dari perpustakaan, internet, dan lembaga penelitian. Analisa data bersikap eksplanatif.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Tingkat analisa yang paling efektif untuk menjelaskan keterlibatan Rusia di Ukraina Timur adalah Tingkat Analisa Regional. Keterlibatan Rusia di Ukraina Timur dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi, geopolitik dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut maka unit ekspalanasinya atau variable independennya berada pada tingkat regional. Sedangkan unit analisisnya atau variable dependennya adalah negara-bangsa. Jadi tulisan ini merupakan analisa induksionis (yang unit eksplanasinya lebih tinggi tingkatnya daripada unit analisisnya). Fokus tulisan ini adalah situasi di wilayah timur Ukraina pada tahun 2014-2015.

H. Sistematika Penulisan

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, teknik pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan

BAB II menjelaskan profil Negara Rusia dilihat dari geografis, sistem pemerintahan yang dilanjutkan dengan gambaran kondisi ekonomi dan politik Rusia. Lalu menjelaskan dinamika hubungan Rusia dengan Ukraina di awal sampai munculnya konflik separatism, yang kemudian

konflik tersebut dimanfaatkan oleh Rusia untuk melakukan intervensi.

BAB III menganalisis faktor-faktor pendorong dalam bidang ekonomi, geopolitik dan militer. Disamping itu akan dijelaskan doktrin-doktrin militer Rusia tahun 1993 dan 2000 yang akan menjadi dasar strategi kebijakan Rusia melakukan intervensi militer di Ukraina Timur yang sedang mengalami konflik separatism.

BAB IV merupakan bagian terakhir berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.